



POPULAR
REPORT

HoB

2018



BIJAK MENGELOLA ALAM

(WORKSHOP PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS LINGKUNGAN)

Lanjak, 29 November 2017

TIM PENYUSUN

Production Leader:

Jimmy Syahirsyah

Writer:

Andi Fachrizal

Editor:

Andi Fachrizal | Ismu Widjaya | Jimmy Syahirsyah |
Lia Syafitri

Design and Layout:

Ageng Mulyono

Photographer:

Victor Fidelis Sentosa

Cover:

Photo : ©WWF-Indonesia/Victor Fidelis Sentosa

Harmonisasi hidup antara orang Iban dengan hutannya yang tetap terjaga hingga kini.

Published by :

Published by WWF-Indonesia West Kalimantan Programme and WWF-Malaysia Sarawak Conservation Programme, in August 2018. Any reproduction in full or in part must mention the title and credit the above mentioned publisher as the copyright owner.

**PANDA SYMBOL**

©1986 WWF-World Wide Fund for Nature
(Formerly World Wildlife Fund) ©WWF
Registered trademark owner

for a living planet®

DAFTAR ISI

MASYARAKAT ADAT BIJAK MENGELOLA ALAM	01
BERKUNJUNG KE RUMAH BETANG SUMPAK SENGKUANG	03
WORKSHOP EKONOMI HIJAU	04
POTRET PSDA BERKELANJUTAN	06
WARGA BERTANYA	08
BERBAGI CERITA SUKSES	11
MENGULIK RASA INGIN TAHU	15
HARAPAN DI UJUNG WORKSHOP	18



© WWF-Indonesia / Victor Fidelis Sentosa

Masyarakat Iban punya kearifan lokal dengan menjadikan hutan sebagai apotek hidup.



© WWF-Indonesia / Victor Fidelis Sentosa

Tuai Rumah Mangat, Sarawak, Malaysia, berbagi cerita hidup dalam workshop pengelolaan sumber daya alam

MASYARAKAT ADAT BIJAK MENGELOLA ALAM

Program ekonomi hijau di jantung Kalimantan adalah sebuah keniscayaan. Melalui konsep inilah, implementasi kapasitas masyarakat dapat ditingkatkan. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dapat berjalan lebih baik, melindungi lingkungan, berorganisasi, dan memiliki kemampuan yang mumpuni dalam mengambil keputusan.

(Workshop
Pengelolaan Sumber
Daya Alam Berbasis
Lingkungan)

Masyarakat adat sudah memanfaatkan sumber daya alam dengan pemahaman dan cara yang berbeda-beda. Misalnya, masyarakat di Kecamatan Empanang, Hulu Gurung, Pengkadan, Seberuang, Semitau, Silat Hilir, dan Silat Hulu.

Antara satu dengan yang lain mengelola lingkungan dan memiliki kearifan lokal sesuai dengan karakter lokal dan kondisi lingkungan. Nilai lokal tersebut dapat menjadi dasar partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekonomi hijau.

Modal partisipasi lain yang dapat dikembangkan adalah, hampir semua lapisan masyarakat, dari tingkat kepala desa, perwakilan berbagai kelompok, termasuk kelompok wanita, aktif dalam mengelola sumber daya alam.

Mereka sudah memiliki pengetahuan secara mandiri dan turun-temurun mengelola serta melindungi hutan. Skema Hutan Kemasyarakatan sudah diakui oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Kehutanan tahun 1999.

Tantangan di masa depan adalah bagaimana masyarakat dapat meningkatkan kearifan dalam mengelola sumber daya alam pada skala yang lebih luas, menjaga kualitas produk, dan memperkuat jaringan sosial di antara masyarakat lokal.

Jika kearifan lokal masyarakat dan produk lokal mereka dapat disinergikan dengan konsep pengelolaan ekonomi hijau, hal tersebut akan menjadi kemajuan berarti bagi konservasi di Indonesia, juga dunia. Bagaimana pun, pengelolaan ekonomi hijau tidak hanya diperuntukkan bagi pelestarian lingkungan, tetapi juga kemajuan masyarakat.



© WWF-Indonesia / Victor Fideles Sentosa

Berbagi pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan antara warga Iban dua negara: Indonesia-Malaysia.



Berkunjung ke Rumah Panjang Sumpak Sengkuan, Kapuas Hulu.

BERKUNJUNG KE RUMAH BETANG SUMPAK SENGKUANG

Gelap mulai menyelubungi Lanjak ketika tiga unit mobil meluncur ke arah Badau menuju Rumah Betang Sumpak Sengkuang, Desa Setulang, Kecamatan Batang Lupar, Kapuas Hulu, Selasa (28/11/2017). Mereka adalah para temenggung Iban, perwakilan masyarakat adat Iban Sarawak,

Forest Dept Kuching, Sarawak, WWF-Malaysia, dan WWF-Indonesia Program Kalimantan Barat.

Menempuh perjalanan selama 15 menit, para tamu kedua negara itu pun sampai di rumah adat Iban. Ada kehangatan dalam penyambutan, saat warga setempat menyajikan tradisi tolak bala khas Iban demi sukses terselenggaranya Workshop Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Lingkungan yang akan dihelat di Lanjak, Rabu (29/11/2017). Sesajian tiga rupa penganan yang diletakkan dalam tujuh piring, berpadu dengan mantra-mantra dari tetua adat mewarnai ritual malam yang takzim.

Banying, Tuai Rumah Betang Sumpak Sengkuang membuka sesi ramah-tamah. Dia mengenalkan masyarakat Iban setempat kepada para tamu yang sedang duduk melantai di selasar rumah. Dari adat-istiadat hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

Selanjutnya, satu per satu mengenalkan diri kepada penghuni rumah panjang. Terutama, para tamu yang berasal dari negeri tetangga Malaysia. Mereka di antaranya adalah Nur Afiqah dan Flora Eliza Saban dari Forest Dept Kuching, Sarawak. Selanjutnya Alicia HG dan Ailyn Nau Sidu dari WWF-Malaysia, Kuching, dan Tuai Rumah Manggat, Sarawak.

Perkenalan diri juga dilakukan oleh rombongan dari Indonesia seperti Albertus Tjiu dan Jimmy Syahirsyah. Keduanya mewakili WWF-Indonesia Program Kalbar. Ada pula Prof Dr Syamsuni Arman, antropolog dari Universitas Tanjungpura Pontianak.

Silaturrehmi antar-masyarakat Iban kedua negara berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Ada keakraban yang bergelak, berdiskusi dalam balutan canda satu sama lainnya. Pemandangan seperti ini sekonyong-konyong telah menjebol tembok geografis negara yang telah memisahkan satu suku yang sama Iban.

WORKSHOP EKONOMI HIJAU

Sejumlah tokoh adat dari enam ketemenggungan Iban berkumpul di Gedung Olahraga Lanjak, Kecamatan Batang Lupar, Rabu (29/11/2017). Tua muda, laki perempuan berkumpul dalam satu wadah bersama demi

menyerap ilmu yang selama ini hanya terdengar dari mulut ke mulut.

Para petinggi adat Iban itu berkumpul guna mendalami sebuah konsep pembangunan berkelanjutan atau biasa disebut dengan ekonomi hijau. “Kita mau tahu seperti apa konsep ekonomi hijau itu,” kata Amat Nyulang, warga Iban dari Dusun Ungak.

Konsep yang dikemas dalam bentuk Workshop Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Lingkungan ini pun dihelat. Narasumbernya, selain akademisi, panitia juga menghadirkan perwakilan warga dari dua wilayah di mana WWF menjalankan program kerjanya. Dua wilayah itu adalah Dusun Meliau di Desa Melemba, Kecamatan Batang Lupar dan Desa Empangau, Kecamatan Bunut Hilir. Perwakilan masyarakat dampingan WWF-Malaysia juga hadir bersama perwakilan Forest Dept Kuching, Sarawak sebagai narasumber.

Sebelum memasuki acara pokok, workshop yang dipandu oleh Technical Support Unit Leader WWF-Indonesia Jimmy Syahirsyah memberikan kesempatan kepada Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah Utara Kapuas Hulu Konstantinus Victor untuk membuka acara.

Dalam sambutannya, dia bercerita tentang wilayah kerja, hutan desa, dan pengelolaannya yang bisa dikerjasamakan dengan masyarakat secara lestari. “Sumber daya alam kita masih banyak yang belum dikelola. Saya mengajak para pihak untuk memanfaatkan sumber daya alam itu secara berkelanjutan. Saat ini, kami juga sedang menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan akan mengundang masyarakat untuk menyusun dokumen tersebut,” papar Victor.

Lebih jauh Victor menjelaskan bahwa masalah yang tengah dihadapi selama ini adalah perbedaan cara pandang antara masyarakat dan pemerintah tentang hutan. Contohnya, masyarakat mengatakan hutan yang ada di sekitar desa merupakan wilayah hutan adat. Tetapi hal itu bertentangan dengan peraturan pemerintah yang menyebutkan wilayah tersebut adalah hutan negara.

Hal itulah yang ingin diselaraskan melalui sejumlah inisiatif. Misalnya melalui skema hutan desa. Saat ini ada empat hutan desa dalam wilayah KPH Utara. Hutan desa dimaksud adalah Nanga Lauk, Menua Sadap, Temoa, dan Mensiau.

Sebelum acara dibuka secara resmi oleh Konstantinus Victor, sejumlah tokoh juga menyampaikan sambutannya. Mereka adalah Camat Batang Lupar Rusdi Hartono, Ketua Serakop Iban Perbatasan (SIPAT) Herkulanus Sutomo, dan Manajer Program Kalbar WWF-Indonesia Albertus Tjiu.

Dalam sambutannya, Ketua SIPAT Herkulanus Sutomo Manna mengatakan bahwa workshop pengelolaan SDA berkelanjutan ini dapat berjalan dengan baik atas kerja sama SIPAT dengan WWF-Indonesia. “Kami melibatkan masyarakat di enam ketemenggungan Iban yang sebelumnya sudah berjibaku dengan pendokumentasian budaya. Prosesnya kemudian diperkuat dengan pembelajaran ekonomi hijau seperti dilakukan hari ini,” katanya.



© WWF-Indonesia / Victor Fidelis Santosa

Delegasi Sarawak Programme WWF-Malaysia Alicia HG saat presentasi teh gaharu di Lanjak, Kapuas Hulu.

Oleh karenanya, Sutomo menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyokong kegiatan tersebut. Khususnya kepada Guru Besar Bidang Antropologi Universitas Tanjungpura Pontianak, Prof Dr Syamsuni Arman.

Di sisi lain, Manajer Program Kalbar WWF-Indonesia Albertus Tjiu menyampaikan latar belakang lembaga yang dipimpinnya bekerja di Kapuas Hulu. “WWF sudah hadir di Kapuas Hulu sejak 1995 dan bekerja sama dengan Taman Nasional Betung Kerihun,” katanya.

Dalam rentang waktu yang panjang itu, pihaknya terus mengupayakan harmonisasi pengelolaan sumber daya alam di kawasan perbatasan yang melibatkan dua taman nasional yakni Betung Kerihun dan Batang Ai. “Harapannya kita bisa menghasilkan output yang dapat dibagi dengan pihak Malaysia,” jelas Albert.

Sementara Camat Batang Lupar Rusdi Hartono dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan semacam ini diharapkan dapat dilakukan secara berkesinambungan. “Kita hidup di jantungnya Kalimantan. Di tangan kitalah pengelolaan kawasan ini dipertaruhkan,” katanya.

Oleh karenanya, kata Rusdi, pengelolaan sumber daya alam secara lestari dan bermanfaat buat masyarakat perlu terus digaungkan. Semoga apa yang dimaksud penyelenggara ini dapat membawa hasil maksimal, dan kita bisa memaknainya secara positif.

POTRET PSDA BERKELANJUTAN

Usai pembukaan, peserta diminta untuk rehat sejenak sebelum masuk paparan inti workshop yang dimoderatori Adri Aliayub. Tidak berselang lama menikmati sajian kopi dan kue, peserta pun berkumpul kembali dalam ruangan.

Adri mengundang seluruh pemateri untuk duduk di tempat yang sudah disiapkan. Mereka adalah Prof Dr Syamsuni Arman, Alicia HG dari WWF-Malaysia, Tuai Rumah Manggat Sarawak, Nur Afiqah dari Forest Dept Kuching, Sarawak, dan Herkulanus Sutomo dari SIPAT.

Syamsuni Arman memulai presentasinya dengan mengulik bentang sejarah ekonomi hijau di dunia. Menurutnya, istilah ekonomi hijau itu lahir di Inggris pada 1989. Kala itu, ada sekelompok ekonom yang menulis sebuah laporan kepada kerajaan Inggris dengan judul Blue Print for Green Economy (cetak biru rencana ekonomi hijau).

“Mengapa hijau? Karena hijau merupakan lambang kehidupan dan kesuburan bagi orang Inggris. Hijau tidak selalu identik dengan hutan, namun berlaku juga di wilayah gurun pasir. Setelah berlangsung sekian lama, ide Green Economy ini pun mulai dibahas di Perserikatan Bangsa Bangsa,” kata Syamsuni.

Di Kalimantan Barat, jelas Syamsuni, istilah ekonomi hijau baru populer sekitar dua tahunan. Dalam penjabarannya, ekonomi hijau itu berkaitan dengan bagaimana menyelamatkan dunia dengan menghijaukan tanah gersang/kering untuk mengurangi emisi karbon dioksida, mengurangi pemanasan global, dan mengembalikan kondisi iklim.

Lebih jauh antropolog Universitas Tanjungpura Pontianak ini juga memaparkan aspek-aspek lain dari ekonomi hijau yang dapat menghemat sumber daya alam dan bermuara pada keadilan sosial. “Artinya, hutan itu bukan barang dagangan semata. Masyarakat juga punya hak untuk merasakan manfaatnya,” katanya.

Secara umum, Syamsuni Arman menjelaskan bahwa tujuan Green Economy adalah meningkatkan kesejahteraan semua orang. Di dalamnya ada kesetaraan (perlakuan yang sama, tidak ada monopoli), dan mengurangi kerusakan lingkungan. “Ini penting supaya kemakmuran diperoleh bagi semua orang,” ucapnya.

Begitu pula dengan pemerintah, sambung Syamsuni, juga harus berperan aktif membuat aturan agar masyarakat yang merasa tertinggal dapat merasakan manfaat hutan. “Silakan pemerintah melakukan hal terbaik. Jangan hanya memberikan hukuman, tetapi juga mendorong orang untuk tidak membuat kesalahan,” kuncinya.

Materi selanjutnya disampaikan oleh Alicia HG, perwakilan WWF-Malaysia Office Kuching, Sarawak. Alicia mengambil contoh sukses Proyek Teh Gaharu di Rumah Manggat, Ulu Sungai Menyang, Sarawak.

Dalam presentasinya, Alicia memaparkan kisah sukses pendampingan WWF-Malaysia di Rumah Manggat. Menurutnya, proyek teh gaharu di Ulu Sungai Menyang ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan upaya pemeliharaan habitat orangutan.

Proyek pemeliharaan habitat orangutan di Ulu Sungai Menyang ada di bawah Jabatan Hutan Sarawak, HoB sejak 2015-2016. Sejak awal, JHS sudah menanam 183 bibit gaharu sebagai contoh. Pada 2016, penanaman dilanjutkan bersama masyarakat sebanyak 3000 bibit.

WWF-Malaysia kemudian membangun kerja sama dengan Forest Dept Kuching, Sarawak dan Aquilaria Plantation Sdn Bhd dalam proyek teh gaharu di Ulu Sungai Menyang bersama masyarakat Rumah Manggat pada 2017. Inisiatif awal menyang kawasan degradasi dengan menanam 8.000 bibit gaharu. “Kita juga memberikan pelatihan menanam dan menjaga pokok gaharu. Kelak, Aquilaria yang akan membeli daun gaharu yang ditanam masyarakat,” katanya.

Selain pelatihan menanam dan menjaga bibit gaharu, masyarakat juga diajak ke kebun milik Aquilaria Plantation pada 3-5 Oktober 2017. Di sana mereka belajar memetik daun gaharu, dan memilih daun yang bagus.

Penanaman gaharu yang dilakukan WWF (Jerman, Indonesia, Malaysia) pun mulai berjalan pada 15-16 November 2017. Warga Ulu Sungai Menyang di bawah pimpinan Tuai Rumah Manggat akhirnya menanam 100 bibit gaharu.

Jauh sebelumnya, warga setempat sudah mulai menanam gaharu sebanyak 200 bibit pada 2015. Selanjutnya pada 2016 warga kembali menanam 3.000 bibit gaharu. “Penebasan lahan dilakukan tiga kali dalam seminggu. Daun gaharu dijual RM 6 per kilogram,” katanya.

Sementara Nur Afiqah dari Forest Dept Kuching, Sarawak dalam paparannya menitikberatkan pada sistem tagang. Sistem ini merupakan kerja sama antara masyarakat dengan pihak kerajaan dalam aktivitas perlindungan, pemeliharaan, dan pengelolaan sumber daya perikanan.

Pemerintah setempat menerapkan sistem tagang ini di Ulu Engkari, Lubok Antu, Sri Aman, Sarawak. Ini merupakan kerja sama antara JHS, Jabatan Pertanian dan Sarawak Forestry Corporation (SFC).

Sistem ini bertujuan melindungi dan memelihara serta mengelola alam sekitar sungai termasuk ekosistem, habitat, ikan, dan perairan. Selain itu, juga mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sumber ikan dan membangun ekowisata.

Nur Afiqah juga menjelaskan berbagai jenis sistem tagang. Mulai dari pemeliharaan ekosistem, penambahan stok organisme akuatik, dan ekowisata berasaskan aktivitas pemeliharaan sumber perikanan.

“Prosesnya dimulai dengan sosialisasi atau dialog dengan masyarakat setempat. Kemudian survey kawasan sungai bersama Jabatan Pertanian Sarawak, regulasi, zonasi, peresmian, pemantauan, dan pembinaan,” kata Nur Afiqah.

Nur Afiqah mengakui awal mula penerapan sistem tagang ini mendapat penolakan dari warga. Mereka yang sudah menerapkan sistem semacam ini kecurian. Tantangan lain adalah, ikan dalam sistem tagang masih perlu diberi makan. Namun, beberapa tahun kemudian, sistem tagang ini diterima warga lantaran nilai jual hasil tangkapan meningkat lebih dari RM10.000.

Ke depan, pemerintah Malaysia akan membangun sistem tagang di sungai-sungai sekitar LEWS. “Kita akan menerapkannya di sungai sekitar taman negara lain untuk tujuan konservasi sungai, pengelolaan hutan lestari, dan akses untuk tujuan ekowisata,” ucapnya.

WARGA BERTANYA

Usai paparan pemateri, kini giliran warga yang bertanya. Hasrat ingin tahu lebih mendominasi jalannya workshop. Mulai dari soal budidaya gaharu hingga sistem tagang.

Octavius misalnya, menanyakan potensi gaharu yang sangat luar biasa. Hanya saja masyarakat belum mengetahui proses pengolahannya. “Bagaimana prosesnya sehingga gaharu tidak hanya menjadi tanaman hias tetapi dapat memberi manfaat?” katanya.

Alicia pun langsung menanggapi pertanyaan itu. Menurutnya, proyek ini baru dilakukan pertama kalinya bersama komunitas di Rumah Manggat. “Belum terlihat keberhasilannya karena masih tahun kedua menanam dan tahun depan baru masuk masa panen,” katanya.

Kendati demikian, jelas Alicia, hal ini masih dapat dikomunikasikan antara WWF-Malaysia dengan WWF-Indonesia, terutama yang berkaitan dengan teknik pengolahan daun gaharu.

Pertanyaan lain datang dari Jimmy Syahirsyah. Dia menyoroti sistem tagang yang dipresentasikan oleh Nur Afiqah. Menurutnya, sangat sulit bagi masyarakat untuk mematuhi aturan, khususnya aturan pengelolaan sungai di sistem tagang. “Bagaimana cara agar masyarakat dapat patuh terhadap aturan yang telah dibuat?” katanya.

Nur Afiqah pun menjelaskan bahwa ada aturan yang diterapkan. Misalnya, jika ada warga yang ketahuan mencuri, maka didenda dengan uang sebesar RM200 atau ada pula dengan satu ekor babi hutan. “Kita juga bisa kerja sama dengan polisi, menggunakan anjing untuk membantu keamanan kawasan sungai,” jelasnya.

Selanjutnya, pertanyaan datang dari Bajai, salah seorang anggota SIPAT. Dia tertarik dengan isu gaharu yang dipaparkan Alicia. Menurutnya, apakah gaharu yang selama ini dimanfaatkan masyarakat sebagai tanaman hias di pekarangan rumah punya khasiat?

Alicia pun menanggapi pertanyaan pertama dari Bajai. “Manfaat mengonsumsi teh gaharu dapat membuat lebih mudah tidur atau mengatasi insomnia, menurunkan kolestrol, dan darah tinggi,” katanya.

Diskusi terus mengalir. Suasana kian atraktif menyusul pertanyaan demi pertanyaan yang datang dari peserta. Sodik Asmoro, tokoh muda dari Desa Melemba menyorot soal sistem tagang. Menurutnya, dalam paparan Nur Afiqah, ada tiga zona dalam sistem tagang. Apakah ada kriteria untuk menentukan setiap zona (hijau, kuning dan merah)?

Nur Afiqah pun menyambut pertanyaan Sodik. Menurutnya, pembagian zona dalam sistem tagang dilakukan berdasarkan potensi. Misalnya, zona merah yang ada lubang-lubuknya atau ikannya besar-besar. Kemudian zona kuning hanya ikan dengan ukuran tertentu sesuai aturan yang dibuat dan boleh ditangkap. Dan zona hijau adalah area tangkap. Jarak masing-masing zona adalah tiga kilometer atau dapat mengikuti kesesuaian kondisi sungai dan ikannya.

Pertanyaan lain datang dari Herkulanus Sutomo Manna untuk Alicia terkait harga jual daun gaharu dari petani ke kilang. “Bagaimana penghitungannya? Apakah dibutuhkan kerja sama dengan WWF atau kilang?” katanya.



© WWF-Indonesia / Victor Fidelis Santosa

Usai presentasi masing-masing pemateri, perwakilan warga pun tak menyia-nyiakan kesempatan untuk bertanya tentang pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

Alicia pun merinci harga gaharu di Sarawak, Malaysia. Menurutnya, harga daun gaharu mencapai RM 6 RM per kilogram. “Untuk gaharu sebanyak 8.000 pohon dapat dipanen dua kali dalam setahun. Gaharu yang digunakan adalah gaharu dari Borneo,” jelasnya.

Jawaban Alicia ini kemudian ditanggapi kembali oleh Tamin, warga Lanjak yang penasaran dengan jenis gaharu Borneo dimaksud. “Jenis gaharu di Kalimantan Barat ada dua jenis, yakni gaharu engkaras yang daunnya kecil dan gaharu siam yang daunnya lebar. “Jenis gaharu mana yang dapat dimanfaatkan sebagai teh?”

Kali ini Tuai Rumah Manggat menjawab pertanyaan Tamin. “Gaharu yang dapat dimanfaatkan sebagai teh adalah gaharu jenis engkaras yang daunnya lebih kecil,” jawabnya singkat sekaligus mengunci diskusi sesi pertama.

Untuk mengusir kejenuhan, peserta pun diminta untuk rehat siang sebelum masuk sesi kedua. Pada sesi ini, peserta akan disuguhkan cerita sukses pengelolaan sumber daya alam di wilayah dampingan WWF-Indonesia, yakni Dusun Meliau, Desa Melemba, Kecamatan Batang Lupar, dan Desa Empangau, Kecamatan Bunut Hilir.



Nur Afifah dari Forest Dept Kuching, Sarawak, berbagi cerita kebijakan Malaysia dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan melalui sistem tagang.

BERBAGI CERITA SUKSES

Adri Aliyub kembali mengundang empat pemateri untuk duduk di depan peserta. Mereka adalah Sodik Asmoro, Jemmi Christian, Octavius, dan Nurul Hasanah. Sodik dan Jemmi adalah warga Dusun Meliau, Desa Melemba, Kecamatan Batang Lupar. Sedangkan Nurul Hasanah adalah warga Desa Empangau, Kecamatan Bunut Hilir, dan Octavius dari Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar.

Empat narasumber ini diminta oleh Adri untuk berbagi kisah sukses tata kelola sumber daya alam secara berkelanjutan di kampung masing-masing. Baik Meliau, Empangau, dan Labian, merupakan wilayah dampingan WWF-Indonesia yang sudah menerapkan praktik-praktik terbaik pengelolaan sumber daya alam.

Sodik Asmoro kemudian memulai kisahnya. Dia bercerita tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Melemba Berbasis Ekosistem dan Berkelanjutan.

Melalui paparannya, Sodik memberikan gambaran umum tentang Desa Melemba yang terletak di kawasan penyangga Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TNBKDS). Dalam menjalankan program pembangunan, desa yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Selimbau ini mengusung visi “Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dengan Meningkatkan Pembangunan SDM, Infrastruktur, dan Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan”.

“Potensi yang ada di desa kami cukup banyak. Mulai dari hasil hutan bukan kayu, perikanan, madu, pertanian, dan perkebunan karet. Semua potensi itu dikelola oleh warga secara berkelanjutan,” kata Sodik.

Dia menjelaskan bahwa ada empat aspek yang dihasilkan saat identifikasi kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV). Keempat aspek tersebut adalah ekowisata, spesies ikan, orangutan, dan hidrologi air.

Melalui hasil kajian HCV ini, warga Dusun Meliau di Desa Melemba kemudian berusaha mengelola potensi yang ada. Untuk ekowisata misalnya, warga mulai menyusun rencana pengembangan, termasuk wilayah kelola dan paket wisata. Sedangkan keragaman jenis ikan terdeteksi ada 58 jenis ikan berdasarkan penelitian WWF dan Untan, dengan jenis-jenis ikan bernilai ekonomi tinggi, serta pengelolaan ICS ikan asin.

Begitu pula dengan potensi orangutan, warga sudah menghitung jumlah populasinya, membangun jalur pengamatan satwa, dan laju peluruhan sarang orangutan melalui monitoring bulanan. Terkait hidrologi air, Desa Melemba melalui pendampingan WWF-Indonesia sudah mengukur kualitas air, pH air, data curah hujan, dan adaptasi perubahan iklim.

Sodik menambahkan selain hasil kajian di atas, Desa Melemba juga sudah menerapkan sistem perencanaan desa dengan baik. Misalnya, pembentukan tim perumusan perencanaan pembangunan desa yang melibatkan masyarakat, kelompok produsen, tokoh adat, tokoh agama, pemerintah desa, dan kelompok perempuan.

Pembahasan rencana program itu dilakukan melalui pembentukan tim. Tim inilah yang bekerja sampai ke dusun-dusun untuk menggali potensi dan apa yang akan dikembangkan masyarakat melalui musyawarah dusun. Hasilnya kemudian dibawa ke tingkat desa melalui musyawarah desa.

Serangkaian perencanaan yang sudah disusun dan implementasikan itu akhirnya melahirkan arah kebijakan pembangunan desa seperti pembangunan wilayah, pembangunan sosial budaya, dan pembangunan ekonomi kreatif.

Sodik menambahkan, salah satu inisiatif yang sudah berjalan adalah sistem pengelolaan ikan air tawar dengan menggunakan ICS. “Untuk pengembangan ekowisata di Meliau, desa sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp76 juta,” jelasnya.

Ke depan, Desa Melemba berencana membangun sistem informasi desa (SID) dan kelembagaannya. Begitu pula dengan perencanaan peningkatan kapasitas kelompok produsen, meningkatkan ekonomi mandiri melalui BUMDes, dan pengelolaan aset desa.

Presentasi yang disampaikan Sodik ini mengundang perhatian peserta. Kisah-kisah warga di jantung Kalimantan melalui komitmen yang tinggi, mengantar kampung halaman mereka sebagai desa yang siap berkompetisi ke arah pembangunan yang berkelanjutan.

Berikutnya adalah giliran Octavius menyampaikan presentasinya terkait peningkatan mutu bahan olahan karet rakyat. Warga Dusun Ukit-Ukit, Desa Labian ini tercatat sebagai Ketua Sentra Karet Barese yang sudah menerapkan sistem pengawasan internal untuk pengembangan produk karet bersih dan kering.

Menurut Octavius, karet adalah salah satu potensi ekonomi di desanya. Ketika harga karet anjlok, masyarakat mulai gerah dan menebang pohon-pohon karet mereka untuk kemudian diganti dengan lada.

WWF-Indonesia sebagai lembaga pendamping menilai kondisi semacam ini tidak dapat menjawab tantangan ekonomi ke depan. Oleh karenanya, sejumlah inisiatif pun dilakukan. Di antaranya dengan menerapkan ICS karet. “Kita baru menyadari bahwa kualitas adalah kunci keberlanjutan pasar produk,” jelas Octavius.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa ICS dibuat untuk membantu menjaga kontinuitas dari mutu karet yang dihasilkan. Selain itu juga untuk membangun kepercayaan konsumen/pabrik. “Dalam hal ini, petani membutuhkan sistem penjaminan mutu yang baik, sebab mutu produk menentukan harga jual,” ucapnya.

Sejak resmi berdiri pada April 2016, jumlah anggota Sentra Karet Barese mencapai 93 orang. Ada proses pembelajaran yang kontinyu. Misalnya standar internal yang meliputi perlakuan bibit dan seleksi bibit.

Selain itu, sambung Octavius, ada alur produksi. Termasuk cara menyadap yang dimulai dari kiri ke kanan atau menghadap ke matahari agar luka bekas sadapan cepat pulih. Penyadapan dilakukan tidak terlalu dalam pada batang pohon karet dan dilakukan dua hari dan selang sehari. Lumpung atau penadah getah karet sebaiknya dengan bambu yang berdiameter 3-5 sentimeter.

Usai Octavius, paparan selanjutnya dari Nurul Hasanah, warga Desa Empangau, Kecamatan Bunut Hilir. Nurul berbagi kisah tentang sukses pengembangan produk ikan asin di kampung halamannya.

Menurutnya, Desa Empangau terletak di DAS Kapuas dan memiliki danau lindung. Namanya Danau Lindung Empangau. Luas danau ini mencapai 103,6 hektar dengan zona inti seluas 30 hektar. Kondisi ekosistem yang asri menjadikan Danau Empangau sebagai sumber daya alam dalam mendukung kehidupan masyarakat.

Berbagai macam jenis ikan komoditi ada di dalamnya. Misalnya toman, jelawat, baung, dan lain-lain. Termasuk juga ikan hias arwana atau siluk (*Scleropages formosus*) terdapat di Danau Lindung Empangau.

Danau ini dikelola oleh Kelompok Masyarakat Pengawas dan Pemerintah Desa Empangau dengan model tradisional. Pola tradisional ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Desa tentang Danau Lindung Empangau dan disahkan melalui SK Bupati Kapuas Hulu No. 6 tahun 2001.

Menurut Nurul, banyak nilai ekonomi yang bisa dipetik warga dari danau lindung. Ini bisa dilihat dari hasil tangkapan ikan konsumsi yang mencapai 8-10 ton per tahun. Sedangkan tangkapan anakan arwana sekitar 100-120 ekor per tahun. Danau lindung juga dimanfaatkan sebagai daerah tujuan wisata yang dikelola masyarakat (ekowisata).

Salah satu hal yang paling berkesan adalah penerapan kontrol internal untuk pengelolaan ikan asin. Kontrol internal atau biasa disebut ICS (internal control system) bermuara pada peningkatan nilai jual ikan asin, dengan mengacu pada aturan lokal dan referensi.

“Awalnya kami memulai dengan membentuk kelompok yang beranggotakan 10 orang. Kami susun SOP, lalu penguatan kelembagaan dengan menyusun mekanisme kerja dan pembukuan. Semua ini mendapat pendampingan yang utuh dari WWF-Indonesia,” tukas Nurul.

Kisah inspiratif lainnya kembali datang dari Dusun Meliau, Desa Melemba, Kecamatan Batang Lupar. Salah seorang tokoh muda Meliau ambil bagian dalam presentasi ekowisata di kampung penyangga Danau Sentarum itu. Dia adalah Jemmi Christian, salah seorang personel Kelompok Pengelola Pariwisata (KPP) Kaban Mayas.

Menurut Jemmi, bentang alam Dusun Meliau merupakan hutan dataran rendah dan dikelilingi danau-danau. Keanekaragaman hayatinya terbilang tinggi. Ada 28 jenis mamalia, 201 jenis avifauna, 22 jenis amfibi, 18 jenis reptile, dan 353 jenis tumbuhan. Bahkan, ikan air tawar yang ada mencapai 20 famili, 35 genus, dan 56 jenis dengan empat jenis ikan potensi tinggi seperti toman dan arwana.

“Kebudayaan kami meliputi pola mata pencaharian, religi tradisional yang masih menggunakan tata cara lama, dan kesenian yang tetap terjaga. Sedangkan aktivitas masyarakat didominasi kaum nelayan perikanan tangkap, berladang, kerajinan tangan, dan ekowisata,” papar Jemmi.

Terkait ekowisata di Meliau, Jemmi menjelaskan bahwa KPP Kaban Mayas sudah mulai terbentuk. Dua tahun kemudian, pada 2012 mendapatkan perhatian khusus dan bantuan dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Beberapa atraksi wisata sudah digalakkan. Misalnya *sport fishing*, *jungle tracking*, dan pengamatan satwa. Fasilitas yang ada di Meliau meliputi stasiun riset, *floating house*, *homestay*, dan air bersih.

Proses pengembangan ekowisata di Meliau diperkuat oleh lembaga pengelola, aturan main, kemitraan dengan lembaga lokal, pelatihan jasa lingkungan, pelatihan *homestay*, pelatihan pemandu, pelatihan kuliner, pelatihan kerajinan tangan dan souvenir, pelatihan adaptasi perubahan iklim di tingkat desa, dan produk ikan asin higienis (ICS).

Program ekowisata di Meliau ini, kata Jemmi, sudah memiliki dampak sosial ekonomi, sumber daya alam, dan pola pikir. “Program ini juga sudah mendapat dukungan dari pemerintah seperti RPJMDes, kawasan lindung, KSK Pariwisata, pengembangan produk ikan air tawar, dan destinasi wisata. Kami juga punya data tertulis yang berkaitan dengan jumlah kunjungan wisatawan,” jelasnya.



© WWF-Indonesia / Victor Fidealis Sentosa

Rasa ingin tahu warga terhadap sejumlah inisiatif pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan membuat suasana workshop kian atraktif.

MENGULIK RASA INGIN TAHU

Paparan demi paparan telah dipresentasikan oleh keempat pemateri. Mulai dari rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Des) Melemba, ICS karet, ICS ikan asin, hingga ekowisata. Kisah inspiratif di tingkat tapak ini mendapat perhatian sejumlah peserta.

Adalah Donatus Langit dari Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum yang menyampaikan sejumlah masukan terkait pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat. “Masyarakat kita sudah lama hidup dalam kawasan Taman Nasional Danau Sentarum. Jumlahnya sekitar 12 ribu warga,” katanya.

Menurut Langit, mereka pun sesungguhnya sudah terlibat dalam kegiatan konservasi pemerintah. Jadi, program konservasi tidak merugikan masyarakat karena pengelolaannya tetap berbasis masyarakat. Hanya saja ada zonasi. Misalnya zona inti, zona rimba, dan zona pemanfaatan.

“Masyarakat dapat memanfaatkan hasil hutan sesuai kebutuhan dan tidak untuk dikomersilkan. Sedangkan dukungan pemerintah dalam peningkatan ekonomi masyarakat juga berjalan seperti bantuan ikan arwana yang dilepasliarkan di Danau Merebung, Desa Melemba,” ucap Langit.

Perjalanan pendampingan WWF-Indonesia di Dusun Meliau, Desa Melemba, juga mengundang perhatian dari F Guyang, warga Tangir II. “Apa saja kegiatan WWF selama bekerja di Desa Melemba?”

Pertanyaan ini langsung disambut oleh Sodik Asmoro. Menurutnya, warga Desa Melemba, khususnya Dusun Meliau sudah 10 tahun hidup berdampingan dengan WWF-Indonesia. “Awalnya pemerintah desa yang minta pendampingan untuk penggalian potensi desa,” katanya.

Selanjutnya, sambung Sodik, WWF terus mendampingi hingga warga dapat menjalankan program di desa secara swadaya. Pendampingan WWF yang sudah berjalan selama ini lebih fokus kepada pemberdayaan masyarakat hingga masyarakat menjadi mandiri.

Octavius juga menambahkan bahwa pendampingan WWF di Desa Labian menysasar sejumlah komponen. “Kerajinan, perkebunan, hingga sektor pertanian, khususnya pertanian beras merah,” imbuhnya.





Suasana workshop pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan di Lanjak, Kabupaten Kapuas Hulu.

HARAPAN DI UJUNG WORKSHOP

Tujuh jam berjibaku dengan sejumlah paparan dan diskusi, sejumlah pihak mengemukakan harapannya. Bahwa ke depan, kisah-kisah inspiratif dari satu dua desa di Kapuas Hulu, dapat menular ke desa-desa lainnya.

P Samosir misalnya, meminta agar penguatan kapasitas masyarakat khususnya masyarakat Iban kian ditingkatkan. “Warga Iban sesungguhnya membutuhkan mitra yang setia mendampingi seperti WWF dan SIPAT,” jelasnya.

Selain itu, sambung Samosir, kerja-kerja bersama dalam satu bingkai persaudaraan perlu terus direkatkan. Kolaborasi dengan Malaysia itu penting dikuatkan karena kita ini masih dalam satu kesatuan ekosistem di Borneo.

Sementara Ketua SIPAT, Herkulanus Sutomo Manna menyampaikan terima kasih kepada seluruh partisipan, baik peserta maupun narasumber atas informasi dan masukan-masukan yang menjadi ilmu baru bagi masyarakat Iban. “Saya berharap kepada seluruh peserta untuk dapat mengolah informasi yang diterima dan diterapkan di wilayahnya masing-masing.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada WWF Indonesia, TNBKDS, dan NGO lainnya yang sudah menyokong Workshop Pengelolaan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan bagi bangsa Iban di enam ketemenggungan.

Hal yang sama juga disampaikan Manajer Program Kalbar WWF-Indonesia Albertus Tjiu. “Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada para partisipan, temanggung, perwakilan TNBKDS, narasumber, peserta dari lintas selatan, NGO, WWF-Malaysia, dan perwakilan Forest Dept Kuching, Sarawak yang tetap bertahan hingga akhir kegiatan hari ini,” ucapnya.

Albert menjelaskan ikhwal kenapa WWF tidak bekerja di semua lokasi sesuai keinginan warga. Sangat mungkin hal ini dipicu oleh keterbatasan informasi mengenai wilayah (desa) tertentu, khususnya informasi mengenai potensi desa.

Dengan adanya informasi mengenai potensi suatu desa, kata Albert, WWF dapat menjadi penghubung dengan para donor atau organisasi internasional yang memiliki dana untuk melakukan pendampingan di wilayah tersebut. “Kita membutuhkan informasi itu agar dapat menjembatani kepentingan warga,” jelasnya.*



© WWF-Indonesia / Victor Fidelis Sentosa

Salah satu tradisi Bansa Iban di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

WWF-Indonesia in numbers

FACEBOOK

facebook.com/wwfmy
facebook.com/WWFIndonesia

WEBSITE

wwf.org.my
wwf.id
globallandusechange.org



TWITTER

twitter.com/wwfmy
twitter.com/wwf_id

Supported by:



Federal Ministry for the
Environment, Nature Conservation,
Building and Nuclear Safety



Why we are here

To stop the degradation of the planet's natural environment and to build a future in which human live in harmony with nature.

WWF-Indonesia (West Kalimantan Programme)
Pontianak Office. Jl. Karna Sosial Gg. Wonoyoso II, No 3
Pontianak, 78121 Kalimantan Barat, Indonesia
Email: Isyafitri@wwf.id

WWF-Malaysia (Sarawak Conservation Programme)
7th Floor, Bangunan Binamas, Jalan Padungan, 93100 Kuching,
Sarawak, Malaysia
Email: comms.asst@wwf.org.my